

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Warren (2005:10) “Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan”. Menurut Bahri (2016:2) “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum.” Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* dalam Hery (2017:1) “Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya.” Menurut Samryn (2014:3), pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan dimana proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomidari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya.

Menurut definisi dari *American Accounting Association* dalam Sadeli (2014:2) “Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut”. Jadi, dari pendapat-pendapat yang ada dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu teknik pengukuran, pencatatan, pengolahan, penyajian data yang berhubungan dengan keuangan serta memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak pemakai informasi.

2.1.2 Pengertian Akuntansi Basis Akrual

Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 “Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar”. Menurut Solehudi (2012:1) “Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan”. Menurut *Study #14 IFAC Public Sector Committee* (2002) menyatakan bahwa “Pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan”. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut.

Basis akuntansi akrual menurut KSAP (2006:3) “Suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.” Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Menurut Halim dan Kusufi (2012:53) “Basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan”. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar.

2.1.3 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2001:2) “Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu”. Menurut Widjajanto (2001:1) “Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan, yaitu input, proses, dan output”. Jadi dari pendapat kedua para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekelompok unsur yang memiliki bagian dan dapat membantu pimpinan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan serta merupakan suatu kegiatan atau fungsi utama manajemen perusahaan. Menurut Mulyadi (2001:180) “Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijadikan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan.”

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) dalam Hartadi (2000:3) “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan, yang terkoordinir yang dianut dalam perusahaan untuk; melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan”. Menurut Mulyadi (2001:163) “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian yang keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen”. Menurut Permendagri Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern, yaitu “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakandan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan danseluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatanyang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Unsur-unsur pengendalian Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan dipemerintah menurut PERMENDAGRI Nomor 60 tahun 2008 terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
 1. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
 2. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;
 3. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
 4. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
 5. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
- b. Komitmen terhadap kompetensi
Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
 1. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
 2. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
 3. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
 4. memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuamanajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.
- c. Kepemimpinan yang kondusif
Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:
 1. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
 2. menerapkan manajemen berbasis kinerja;
 3. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
 4. melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
 5. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah;

6. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
1. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;
 2. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah;
 3. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;
 4. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 5. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
 2. pegawai yang diberi wewenang dan memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 3. pegawai yang diberi wewenang dan memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
1. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
 2. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen;
 3. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:
1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas:

a. Identifikasi Risiko.

Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

1. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
2. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal;
3. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko

b. Analisis Risiko.

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan, penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis;
- f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Jadi, dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mulyana (2010:96) adalah “Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”. Menurut Masmudi (2003:77) “Laporan keuangan adalah Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya”. Laporan keuangan daerah menurut Baridwan (2000: 17) yaitu “Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan”. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No.1 mendefinisikan “Laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Menurut Mulyana (2010:96) “Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”. Nordiawan (2010:44) menyatakan “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.

Karakteristik suatu laporan keuangan menurut *Governmental Accounting Standards Board* (1987) dalam *Concepts Statement No. 1* tentang *Objectives of Financial Reporting* (par. 62) menyatakan bahwa:

Financial reporting is the means of communicating financial information to users. For this communication to be effective, information in financial reports must have these basic characteristics: understandability, reliability, relevance, timeliness, consistency, and comparability.

Laporan keuangan merupakan artian dari pengkomunikasian informasi keuangan kepada para pengguna laporan keuangan. Agar komunikasi ini menjadi lebih efektif, informasi dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik dasar meliputi mudah dipahami, reliabel, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dibandingkan. Sedangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

- a. Memiliki Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki Manfaat Prediktif (*Predictive Value*)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat Waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

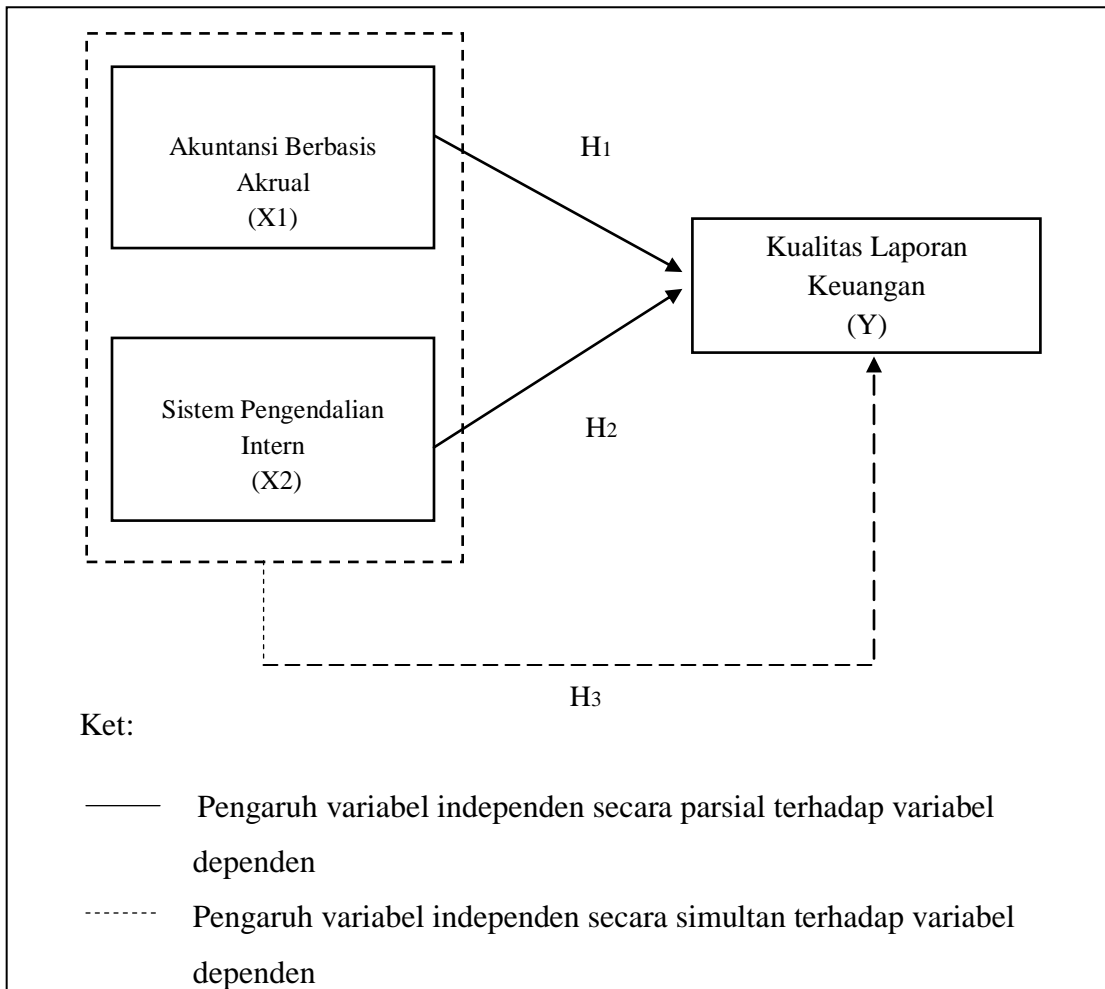
4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud”.

Jadi, kesimpulannya adalah kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia mengeluarkan hal baru dengan cara menerapkan akuntansi berbasis akrual. Ditetapkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP ini maka PP No.24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun meski sudah dinyatakan tidak berlaku secara substansial PP No.24 Tahun 2005 masih dilaksanakan dalam rangka proses transisi penyusunan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual kepada penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Substansi PP No.24 Tahun 2005 tersebut dinyatakan dalam Lampiran II PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP. SAP berbasis akrual ini bertujuan agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan bisa lebih akurat, relevan, dan dapat lebih transparan. Alur hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Dianne Natalia Christanti	Pengaruh Akuntansi Berbasis AkruaL Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat)	Akuntansi Berbasis AkruaL, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akruaL memiliki pengaruh yang signifikan dengan kualitas laporan keuangan secara parsial. Begitu juga dengan sistem pengendalian intern yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial. Sedangkan secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akruaL dan sistem pengendalian intern juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini mempunyai arti bahwa akuntansi berbasis akruaL dan sistem pengendalian intern memiliki hubungan yang kuat satu sama lain terhadap kualitas laporan keuangan, maka sebaiknya kedua variabel ini dilakukan atau dijalankan secara bersamaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di biro keuangan setda pemerintah provinsi Jawa Barat.
2.	Ida Ayu Enny Kirana Yanti	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaL, Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif, sama halnya dengan sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan juga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif, lalu selanjutnya yaitu pemahaman akuntansi berbasis akruaL dan kualitas laporan keuangan juga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif. Hal ini berarti menunjukkan bahwa semakin tingginya pemahaman basis akruaL yang dimiliki oleh sumber daya

				manusia maka semakin tinggi juga tingkat kualitas laporan keuangan pada daerah tersebut.
3.	Demonti Septiani	Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial, selanjutnya adalah sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan untuk variabel pemanfaat teknologi dan kualitas laporan keuangan juga saling memiliki pengaruh. Sehingga semua variabel didalam penelitian ini saling memiliki pengaruh yang signifikan.
4.	Ni Luh Nyoman Ari Udi Yanti , Ananta Wikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng).	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Staf Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial. Begitu juga dengan sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif. Hasil penelitian ini berarti menunjukkan jika semakin tinggi penerapan sistem pengendalian intern maka hasil kualitas laporan keuangan pada kabupaten buleleng juga akan semakin tinggi. Untuk variabel kompetensi staf akuntansi juga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif dengan kualitas laporan keuangan. Untuk variabel selanjutnya secara simultan di kabupaten buleleng ini Standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

5.	Arina Roshant, Edy Sujana dan Kadek Sinarwati	Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, Sistem Pengendalian Intern, Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pelaporan keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif secara parsial. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi juga secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keterandalan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Untuk variabel sistem pengendalian intern terhadap keterandalan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial. Selanjutnya secara simultan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
6.	Delanno dan Deviani	Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, Pengawasan Keuangan dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kalau secara parsial kapasitas sumber daya manusia dan pelaporan keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif. Pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif secara parsial terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Untuk variabel pengawasan keuangan daerah juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Untuk hasil penelitian secara simultan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.4 Hipotesis

2.4.1 Hubungan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Syaiful (2014:44) “Penggunaan basis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah, merupakan upaya untuk mendukung perbaikan kualitas laporan keuangan”. Menurut Sari dan Putra (2012:2) “Laporan keuangan yang disusun dengan basis akrual dapat menganalisis transaksi secara layak dan lebih dapat diandalkan, selain itu basis akrual dapat merepresentasikan reliabilitas, relevansi dan komparabilitas informasi yang diungkapkan dalam laporan, sehingga dapat dipastikan bahwa informasi telah disajikan secara jujur”. Sedangkan menurut standar akuntansi pemerintah (SAP) menyatakan bahwa “Akuntansi berbasis akrual menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya, akurat, komprehensif dan relevan”.

2.4.2. Hubungan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Ditetapkannya sistem pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dapat dipahami, tepat waktu, akurat dan lengkap serta dapat diaudit. Jadi, dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik maka harus sesuai dengan PSAK dan SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus atau tidaknya suatu sistem pengendalian internal. Sedangkan menurut Mahmudi (2007:27) menyatakan bahwa “Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah dimana sistem akuntansi itu sendiri di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian internal”.

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan, teori, konsep, serta kerangka pemiiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

- H2 : Sistem Pengendalian intern (SPI) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- H3 : Akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.